

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dikemukakan bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri didalam kesatuan Republik Indonesia. dalam peraturan pemerintahan No 57 tahun 2005 tentang desa sebelumnya disebutkan bahwa desa juga merupakan kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana, serta memperhatikan kondisi masyarakat dibawah mereka dengan merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakatnya, serta membuat program-program yang telah siap untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengerakan serta perangkat desa untuk turut ikut andil dalam menjalankan program-program tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan merata pemerintahan pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri, Tujuan untuk dibuatnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah untuk lebih menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dalam konteks ini tentu hanya sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatifnya saja peran masyarakat dan partisipasi masyarakat nya lah yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program-program pemerintahan desa.

Pentingnya peran Pemerintahan Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa, maka pembangunan desa memiliki elemen dalam penyelenggaraan otonomi masyarakat desa, “yakni :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Sekretaris Desa, mempunyai tugas membantu kepala Desa dan bertanggung jawab pada kepala Desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi Desa.
- c. Pelaksanaan Teknis Lapangan
- d. Unsur Kewilayahan
- e. BPD
- f. Lembaga kemasyarakatan”

Pemerintahan desa mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerak dan mengontrol seperti tersebut diatas hendaknya bisa menerapkan fungsi dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat dibawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan program-program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat serta perangkat desa yang lainnya turut andil dalam menjalankan program-program tersebut, langkah akhir yang dilakukan pemerintahan desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan mencapai targer ditentukan serta apakah program tersebut bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintahan pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, Karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Makna Utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah identitas politik yang otonom, konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif diwilayah kecamatan sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan dari kabupaten. Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Bilamana pemerintahan desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat aparatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang akan terjadi adalah kefakuman. Konsekuensi dari kenyataan tersebut, Pemerintahan Desa (Kepala Desa) harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintahan desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Adanya Undang-undang tentang desa yang dimana didalamnya termuat keuangan desa, pemerintahan desa lebih mudah menggerakkan pembangunan dengan menggunakan dana alokasi desa dari pemerintahan pusat, yakni 1,4 Milyar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menyebutkan :

**“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

- a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- d. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
- e. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- f. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (*satu*) tahun.

- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan dalam pemerintahan Desa.
- h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- i. Alokasi Dana Desa. selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pembangunan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (*RKP-Desa*) adalah dokumen perencanaan untuk periode I (*satu*) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta pikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan Musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (*RKP-Desa*). Penyusunan dokumen RKP-Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (*APB-Desa*), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tentu tidak dapat dipisahkan ,

dan di susun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP desa dan APB-Desa merupakan dokumen dan informasi publik . pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP-Desa di tetapkan dengan surat keputusan (*SK*) kepala desa dan di susun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (*musrembang*) tahunan atau biasa di sebut musrembang desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (*input*) Penyusunan dokumen APB-Desa Dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (*ADD*), Pendapatan Asli Desa (*PA-Desa*), Swadaya dan partisipasi masyarakat, Serta sumber lainnya yang tidak mengikat.

Proses Penyusunan dokumen RKP-Desa Dapat di bagi dalam Tiga tahapan, Tahapan Tersebut” adalah :

- a. Tahapan Persiapan Musrembang Desa, Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM-Desa, Mengkaji ulang dokumen RKP-Desa Tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan meninjau kembali data ke lapangan bila di perlukan. Analisis data yang di lakukan seringkali di sebut sebagai “analisis kerawanan Desa” atau “analisis Keadaan darurat desa” yang meliputi data kk miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita , dan sebagainya . hasil analisis ini di lakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Draft rancangan awal RKP-Desa Dan perhitungan anggarannya.

- b. Tahapan pelaksanaan musrembang Desa, merupakan Forum Pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa” Membahas Darft Rkp-Desa, Menyepakati kegiatan , Serta merevisi RKP-Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan (SK) Kepala desa.
- c. Tahap sosialisasi, merupakan dokumen RKP-Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP-Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB-Desa. RKP-Desa Dan APB-Desa Wajib di publikasikan Agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan pengawasan Partisipatif terhadap pelaksanaannya”.

Dalam kegiatan pembangunan, peran masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat desa , disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah desa , namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif , maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :



1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatans.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat sangat di butuhkan.

merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat yang di dukung pemerintah desa tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan. Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa pegagan julu II , Pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk di jadikan

tempat pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musrembang yang di adakan oleh pemerintah desa dan di awasi oleh pendamping desa, yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan di desa pegagan julu II. Musrembang Desa merupakan hak untuk masyarakat menyuarakan berbagai aspirasi untuk menunjang pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Terkait dengan pembangunan di Desa Pegagan julu II, dimana memiliki 5 dusun dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 1.1 Jumlah Dusun Desa pegagan julu II**

<b>Dusun</b>	<b>Kepala Dusun</b>
Dusun I	Surung Sihotang
Dusun II	Harles Lumban Gaol
Dusun III	Pakam simarmata
Dusun IV	Pantas Simanullang
Dusun V	Darlin Sianturi

*Sumber : Desa Pegagan julu II .*

Pemerintah Desa Pegagan Julu II mempunyai beberapa program sebelumnya di tahun 2016 dan 2017, yang kemudian berlanjut di tahun 2018 untuk pembangunan desa yang berbentuk fisik, seperti pembangunan pengaspalan jalan , pemetaan lingkungan, Pembuatan parit semen, serta program prioritas kegiatan desa yang berbentuk non fisik seperti, bidang pembinaan

kemasyarakatan (*pembinaan kader posyandu*), Bidang pemberdayaan masyarakat desa (*Pelatihan pembinaan Kader PKK*) . Dimana pembangunan tersebut menjadi hal yang menarik bagi peenliti untuk melakukan penelitian, desa Pegagan Julu II merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan sumbul, Kabupaten Dairi yang memiliki 5 Dusun. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan didesa Tersebut untuk menunjang produktivitas masyarakat setempat dalam berbagai bidang dengan itu pemerintah desa pegagan Julu II memanfaatkan dana Alokasi pemerintah pusat yang disalurkan kepada desa yakni sebesar 1,4M dana serta memanfaatkan Pendapatan asli desa (*PAD*). Itulah yang nantinya dipergunakan pemerintahan desa untuk membangun infrastruktur untuk menunjang produktivitas masyarakat desa. jika melihat secara kasat mata, pembangunan yang terjadi didesa Pegagan Julu II sangat mengalami cukup banyak kendala, hal ini disebabkan kepedulian pemerintahan desa pegagan Julu II mengajak masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Disisi lain juga masyarakatnya yang cenderung memiliki aktivitas pekerja masing-masing yaitu berladang, serta masi lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan baik mulai perencanaan , pelaksanaan maupun dalam pemeliharaan kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa yang harus dituntut untuk menggunakan pendekatan perencanaan kepada masyarakatnya bukan hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan dan dilain sisi juga pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya dapat membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengolahnya maka yang seharusnya dilakukan

pemerintah adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut dan melibatkan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA ”**

Studi pada : Desa Pegagan Julu II, Dusun II, Kec.sumbul, Kab.Dairi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti ingin merumuskan masalah yang akan dikaji melalui referensi suatu penelitian dan ingin melakukan penelitian dengan melihat permasalahan yakni :

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang berbentuk aspek fisik seperti, (*sarana dan prasarana*) Non fisik, (*Bidang pemberdayaan masyarakat desa*) di desa pegagan julu II kecamatan sumbul kabupaten dairi ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di desa pegagan julu II kecamatan sumbul kabupaten dairi ?

### **1.3 Ruang Lingkup masalah**

Mengingat agar terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah difokuskan pada peran pemerintah desa dan masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur berbentuk aspek fisik (sarana dan prasarana ), Non fisik (Bidang pemberdayaan masyarakat desa).

### **1.4 Hipotesis**

Dalam tahapan ini peneliti mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan di teliti yang masih bersifat praduga karna nantinya masih harus di buktikan kebenarannya. sebelumnya saya sudah melakukan observasi daerah penelitian pada bulan 2 yang lalu, saya melihat Desa pegagan julu II kecamatan sumbul kabupaten dairi, merupakan salasatu desa terbaik karna pada kenyataannya hanya desa pegagan julu II sajalah yang mempunyai gedung kantor desa , dari 15 desa yang ada di desa pegagan julu II , Kecamatan sumbul tersebut. Mengenai infrastruktur fisik yang ada di desa pegagan julu II ini , ada beberapa dusun di desa pegagan julu II ini yang saya lihat pembangunan jalannya tertinggal , ketika saya bertanya kepada masyarakat setempat apakah ada program pembangunan di lakukan di desa pegagan julu II ini , mereka banyak yang mengatakan bahwa pembangunan di desa pegagan julu II, sangat terlambat dan tertinggal dari desa yang lain , kemudian saya penasaran dengan pernyataan warga desa pegagan julu II tadi yang mengatakan bahwa tertinggalnya pembangunan di desa pegagan julu II , saya penasaran dan kemudian mencoba mengelilingi desa

tersebut sambil bertanya mengenai luas wilayah desa tersebut kepada masyarakat setempat , ternyata luas wilayah desa tersebut cukup luas kurang lebih 400 Hektar , yang terbagi dalam 5 dusun, dari kenyataan yang saya lihat pada saat melakukan observasi di desa pegagan julu II , saya dapat menyimpulkan bahwa, kendala pembangunan di desa pegagan julu II di sebabkan karna luas wilayah desa pegagan julu II yang cukup luas mengakibatkan pembangunan menjadi terlambat, Karna yang saya ketahui mengenai peraturan pemerintah desa dalam tahapan pembangunan desa, atau pun Program pembangunan jangka satu tahun itu hanya berupa program pembangunan, lanjutan , tentu luas wilayah dari desa pegagan julu II mempengaruhi tercapainya program pembangunan tersebut, Karna sistim dari perumusan RKP-Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa), adalah Program-Program prioritas yang terlebih dahulu Program tersebut di Rundingkan di tingkat dusun atau yang sering disebut Musdus, dan berlanjut Ke Tingkat Desa, dalam Musyawarah tingkat desalah Akan di poin apa yang menjadi prioritas pembangunan Di desa Tersebut nantinya, Dari Perumusan di atas lah saya Menyimpulkan jawaban sementara Bahwa yang membuat kurang optimalnya pembangunan di desa pegagan julu II adalah luas wilayahnya dan Kurangnya koordinasi antara masyarakat desa di setiap dusun Bersama Pemerintah. Sebagai tambahan dalam Hipotesis ini, Pembangunan Infrastruktur desa dapat Optimal jika pemerintah dan aparatur, serta bersama masyarakat mampu menggunakan dana desa secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa, walaupun dalam tahapan Pertama (1) pencairan anggaran hanya di peruntuhkan sebesar 20% saja.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang berbentuk aspek fisik (*sarana dan prasarana*) agar dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di desa pegagan julu II kecamatan sumbul kabupaten dairi .
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di desa pegagan julu II kecamatan sumbul, kabupaten dairi.
3. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa pegagan julu II kecamatan sumbul, kabupaten dairi.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan kesejahteraan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat baik dalam bidang pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur desa nantinya.
- 2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

- 3) Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 4) Bagi peneliti, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah mengenai analisis peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan teori, pendapat Atau pun gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini. <sup>1</sup>Sugiyono (2013:52) menyatakan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba dalam penelitian ini, yang menjadi kerangka teorinya adalah sebagai berikut :

1. Teori Optimalisasi
2. Teori peran pemerintahan desa
3. Teori partisipasi pembangunan
4. Teori partisipasi masyarakat
5. Teori pembangunan infrastruktur desa

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, bandung, 2013 hal 52

## 2.2 Pengertian Teori Optimalisasi

Menurut <sup>2</sup>Depdikbud (1995 : 628) Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian Optimalisasi menurut wikipedia adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, <sup>3</sup>W. J. S. Poerdwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar Tercapai secara optimal.

---

<sup>2</sup> Depdikbud. *Kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hal 628

<sup>3</sup> W. J. S. Poerdwadarminta. *Kamus besar bahasa indonesia*. Balai Pustaka, 1997, hal 753

### **2.2.1 Indikator Proses Optimalisasi**

Optimalisasi Proses adalah upaya atau cara untuk memperbaiki, tujuan agar masalah dalam suatu tujuan yang ingin dicapai dapat mencapai keberhasilan secara efektif dan efisien. Untuk memperbaiki aspek-aspek masalah yang kurang optimal dalam suatu tujuan, Kegiatan tindak lanjut dimulai dengan merancang dan mengajukan berbagai solusi alternatif berdasarkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam masalah yang ingin diperbaiki. Indikator Prosesnya adalah Komponen yang harus mempunyai suatu standard tersendiri, sehingga dalam pelaksanaan pembuatan pencapaian tujuan dapat dijalankan berdasarkan indikator prosesnya yang meliputi faktor internal dan eksternal dari suatu instansi penyelenggara kegiatan yang ingin memperbaiki aspek-aspek masalah.

## **2.3 Peran Pemerintahan Desa**

### **2.3.1 Pemerintahan Desa**

Dalam <sup>4</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa

---

<sup>4</sup> Peraturan Mendagri, Tentang pedoman pembangunan desa , Nomor 114, Tahun 2014.

merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan modern yang bertugas mengelola barang-barang public.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Unsur dari pemerintahan desa ialah Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknik perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada dipemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemeliharaan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam <sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 disebutkan bahwa kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusann pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa, urusan pembangunan yang

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014, Tentang desa, Tugas kepala desa, Pasal 26.

dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam <sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Pasal 2 ayat 1 tentang pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud.

Kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan unuk meningkatkan

---

<sup>6</sup> Peraturan Mendagri, Nomor 114, Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa, pasal 2.

kehidupan rakyat desanya. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.

### **2.3.2 Peranan**

Pada saat ini peranan Pemerintahan Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintahan Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pulak dengan pengembangan

kapasitas pemerintahan Desanya sehingga, desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

<sup>7</sup>(Soerjono Soekanto 2002 : 243-224) mengatakan peran mencakup tiga hal,” antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Fungsi dari peranan ialah:

- a. Memberi arahan pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi)
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan (delgasi)
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat”.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Peranan yang diharapkan (*expected roles*) ialah cara ideal dalam pelaksanaan perananan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat mengkhendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. peranan jenis ini antara

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. soerjono soekanto. Sosiologi suatu pengantar, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hal 243-244.

lain peranan kepemimpinan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

## **2.4 Partisipasi pembangunan**

### **2.4.1 Pengertian partisipasi Pembangunan**

<sup>8</sup>Menurut (Tjokroamidjojo 1985: 222) dalam bukunya di katakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Di sini terlihat empat (4) aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yang di katakan oleh <sup>9</sup>(Tjokroamidjojo 1985: 222-224)

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijakan pembangunan ini tidak saja di tekankan oleh suatu organisasi seperti PBB, tetapi juga oleh seorang ahli

---

<sup>8</sup> Bintoro Tjokromidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan LP3S, PT.Repro Golden Victory, Bandung, 1985, hal 222

<sup>9</sup> Bintoro Tjokromidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan LP3S, PT.Repro Golden Victory, Bandung, 1985, hal 222-224.



seperti waldo,<sup>10</sup> hanya perlu di ingat dalam hal ini adalah batasan-batasan tertentu.

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah di tentukan dalam proses politik, dalam hal ini tergantung dari sistim dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu negara. Adakalanya pemerintah mengambil kebijaksanaan yang bersifat mobilisasi daripada partisipasi.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkatan tertentu memberikan kesempatan secara langsung pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

## 2.5 Teori Partisipasi Masyarakat

### 2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut <sup>11</sup>Mubyarto partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi dapat juga disebut sebagai partisipasi vertical dan horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien.

---

<sup>10</sup> United nations 1971, *Public administration in the secon united nations development decade* Dalam Dwight waldo (ed), *Public administration in time of Turbelence*.

<sup>11</sup> Mubyarto (1977), Kebijakan manajemen Publik, Pengertian partisipasi masyarakat, <http://journal.unair.ac.id>

Disebut partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tertentu tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Lebih lanjut secara sederhana partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tugas tersebut, kewenangan hak, dan kewajiban. Jadi partisipasi diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan.

### **2.5.2 Sebab Terjadinya Partisipasi**

Sebab terjadinya Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut <sup>12</sup> Keith Davis, 1962 Dalam Wikipedia Mengenai sebab terjadinya partisipasi . Ada tiga (3) unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang sebab partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu :

(1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

(2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya.

(3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada.

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah, sebab terjadinya partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

### **2.5.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat dan faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya menghambat keberhasilan program.

---

<sup>12</sup> Keith Davis, 1962, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi/issues>

Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan seseorang. Kegiatan program merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh kelompok yang dapat berupa organisasi masyarakat dan Organisasi Pemerintah.

Menurut <sup>13</sup>angell (dalam Ross, 1967: 130), Yang di tulis dalam kutipan wikipedia ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi, “yaitu:

- a. Usia, Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral masyarakat yang lebih mantap, cenderung banyak berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
- b. Jenis kelamin, nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur, yang berarti bahwa banyak peran <sup>14</sup>masyarakat peran perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga , akan tetapi semakin lama peran perempuan tersebut bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik .
- c. Pendidikan, tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan identifikasi terhadap tujuan program.

---

<sup>13</sup> angell (dalam Ross, 1967: 130), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi/issues>.

<sup>14</sup> angell (dalam Ross, 1967: 130), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi/issues>.

- d. Pekerjaan dan penghasilan , hal ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain, karna pekerjaan seseorang akan menentukan beberapa penghasilan yang diperolehnya,. Pekerjaan dan penghasilan yang baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akan mendorong dan mendukung seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
- e. Lama tinggal, lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan terutama dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama iya tinggal dalam lingkungan tersebut, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

#### **2.5.4 Tujuan Partisipasi**

Pada hakikatnya Tujuan Partisipasi adalah memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk bisa ikut serta (Berpartisipasi) di dalam proses pembangunan. Adapun proses pembangunan yang di maksud adalah antara lain, baik seperti dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian serta turut menikmati hasil pembangunan tersebut

Di bawah ini akan di uraikan beberapa tujuan partisipasi menurut<sup>15</sup>Schiller dan Antlov (dalamHetifah, 2003:152) Yang akan di jelaskan sebagai berikut :

- a. Menciptakan visi bersama
- b. Membangaun rencana
- c. Mengumpulkan gagasan
- d. Menentukan prioritas (membuat pilihan)
- e. Menjaring aspirasi(masukan)
- f. Mengumpulkan informasi (analisis situasi)

## **2.6 Pembangunan Infrastruktur Desa**

### **2.6.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa**

Menurut <sup>16</sup>(Sondang P.siagian 1983) yang di kutip dalam Wordpress, Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah, menuju midernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Isitilah Pembangunan juga merupakan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan “*pe*” dan akhiran “*an*”guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat

---

<sup>15</sup> Schiller dan Antlov (dalamHetifah, 2003:152), [Http://www.materipelajar.com/](http://www.materipelajar.com/)

<sup>16</sup> Sondang.p.siagian ,<https://Perencanaanpembangunan.wordpress.com>

dari segi ini, konsep pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai :

- a. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa
- b. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun seperti hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Sehingga dapat meningkatkan

efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan: Sistem ekonomi, Sosial budaya, Kesehatan dan kesejahteraan.

### **2.6.2 Program Pembangunan**

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksprementil, dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program yang dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif.

Menurut <sup>17</sup>(Bintoro Tjokromidjojo 1985: 195-196) suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan yang dirumuskan harus cukup jelas

---

<sup>17</sup> Bintoro Tjokromidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan LP3S, PT.Repro Golden Victory, Bandung, 1985, hal 195-196.



2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program selektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

## **2.7 Definisi Konsep**

### **A. Optimalisasi**

Optimalisasi Proses adalah upaya atau cara untuk memperbaiki, tujuan agar masalah dalam satu tujuan yang ingin dicapai dapat mencapai keberhasilan secara efektif dan efisien. Untuk memperbaiki aspek-aspek masalah yang kurang optimal dalam suatu tujuan.

### **B. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

### **C. Masyarakat desa**

Masyarakat perdesaan adalah sekelompok orang yang bermukim di suatu desa, yang berlandaskan sistem kehidupan berkelompok dengan dasar kekeluargaan.

#### **D. Pembangunan**

pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksprementil, dan aplikasi-aplikasi gagasan baru.

## 2.8 Definisi Oprasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Peran Pemerintah Desa	1. Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tata cara Pengambilan Keputusan</li> <li>➤ Kemampuan dalam Pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagaimana cara yang di lakukan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan dan sejauh mana kemampuan dalam pengambilan keputusan tersebut ?</li> </ul>
	2. Memberikan Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan melalui kegiatan Pembinaan Masyarakat</li> <li>• Penghasilan Tetap dan Tunjangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah dengan melakukan kegiatan diklat, ataupun pelatihan-pelatihan kader kemasyarakatan dapat membantu meningkatkan Kinerja Pemerintah desa ?</li> <li>➤ Apakah ada Pemberian Penghasilan tetap</li> </ul>

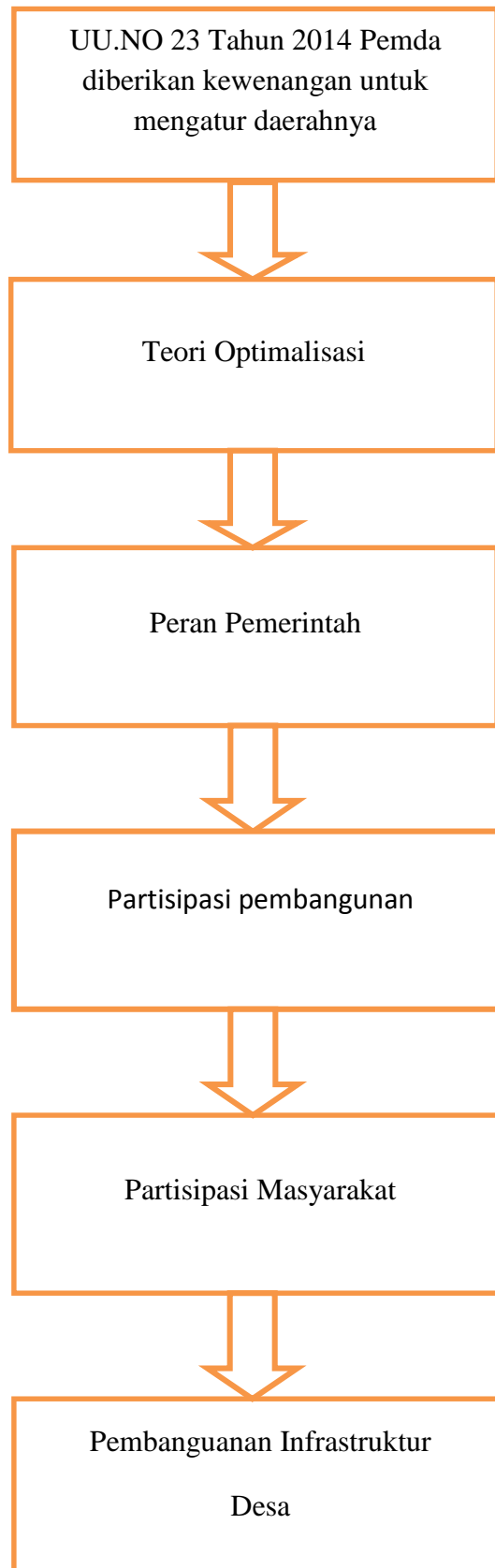
			dan tunjangan kepada kepala dusun ?
	3. Penyusunan Pelaksanaan Program pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan evaluasi Program-program pemerintah</li> <li>➤ Keterlibatan dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejauh mana Pemerintah melakukan Evaluasi Terhadap Program-program yang telah di laksanakan, dan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan desa ?</li> </ul>

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Peran Masyarakat Desa	4. Penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyusunan RKP-Des</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah dalam Penyusunan RKP-Des Masyarakat di libatkan ?</li> </ul>
	5. Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan Mulai dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah dalam pembangunan desa mulai dari tahapan perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, masyarakat di libatkan ?</li> </ul>

	6. Pembinaan kemasyarakatan	➤ Pembinaan kemasyarakatan serta pencapaian program pemerintah desa	➤ Apakah ada di lakukan penyuluhan oleh pemerintah desa , serta apa pencapaian program-program pemerintah desa yang di dapat oleh masyarakat ?
--	-----------------------------	---	--

## 2.9 Kerangka berfikir

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Pembangunan di Desa salah satunya di pengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur yang memadai Baik pembangunan infrastruktur secara fisik maupun non fisik , infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada masyarakat desa. Adapun Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. pendekatan dan metodologi penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, <sup>18</sup>(Nasir : 1988) dalam Wordpress menjelaskan metode penelitian ialah cara utama yang di gunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang di ajukan , sedangkan menurut <sup>19</sup>sugiono (2013:2) dalam bukunya lebih memperjelas bahwa , metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. Kesimpulan dari kedua pendapat di atas bahwa dalam melakukan penelitian perlu di lakukan pendekatan untuk mencapai suatu tujuan, dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah , data , mempunyai tujuan tertentu , untuk menentukan jawaban dari masalah yang ada .

#### **3.2 Lokasi Dan waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pegagan julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi . Dalam hal ini Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih Desa Pegagan julu II, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi khususnya,

---

<sup>18</sup> (Nasir : 1988), <https://setiawantopan.wordpress.com/>

<sup>19</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 2.

untuk melihat apa saja yang menjadi masalah dan kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan di desa pegagan julu II.

Pembangunan sebagai fokus penelitian, karena pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Berbicara akan pembangunan yang ada di Desa pegagan julu II belum sepenuhnya maksimal, banyak hal yang melatarbelakangi akan kendala dalam pembangunan tersebut. Desa Pegagan Julu II adalah sebuah desa yang berjarak sekitar 163 km dengan waktu tempuh 4 jam perjalanan dari ibu Kota Medan, Adapun waktu penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti di desa pegagan julu II kecamatan sumbul, kabupaten dairi adalah pada bulan juli dan agustus 2018 .

### **3.3 Tipe Penelitian**

Jenis tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. “Menurut<sup>20</sup> sugiono (2013:9), menjelaskan bahwa” :

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah , (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan) , analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

---

<sup>20</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 9.



Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut <sup>21</sup>sugiyono (2013:58) , deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang di teliti, melalui pendefenisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai refrensi sehingga ruang lingkup , kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan di teliti menjadi lebih jelas dan terarah.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 58.

### **3.4 Jenis Data Penelitian**

#### **3.4.1 Data Primer**

Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

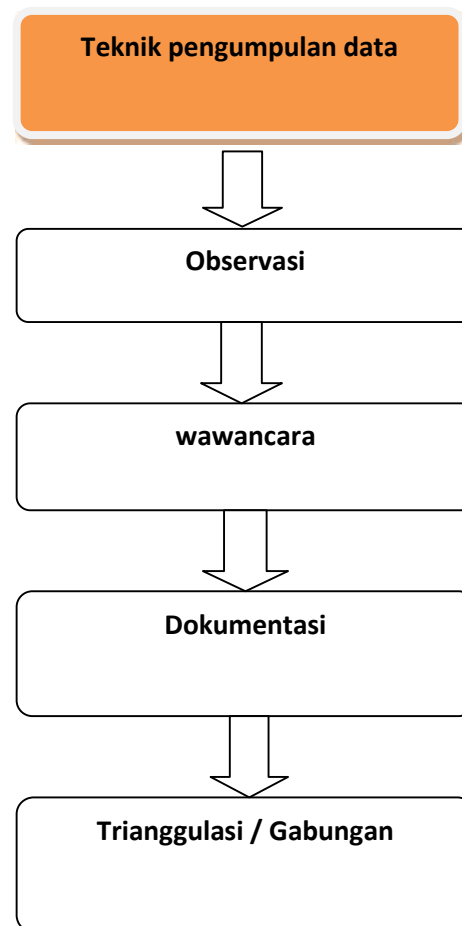
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan peristiwa. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta Data-data yang di dapat Dari kantor desa berupa Dokumen RKP-Desa atau RPJM-Desa serta Penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tentu tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting atau sumber, dan berbagai cara, terlihat

secara umum terdapat 4 teknik pengumpulan data menurut <sup>22</sup>Sugiono (2013:225) dalam bukunya , yaitu :

**Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data**



---

<sup>22</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 225.

Dalam tehnik pengumpulan data penelitian, <sup>23</sup>nasution (1988) menyatakan dalam buku sugiyono (2013:223) :

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa, segala sesuatunya belum mempunya bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang di gunakan, bahkan hasil yang di harapkan, itu semua tidak dapat di tentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain. dan hanya peneliti itu sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **3.5.1 Observasi / Penelitian lapangan(*field research*)**

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian Seperti melakukan penelitian ke kantor desa dan Lingkungan Desa yang di teliti. <sup>24</sup>Nasution (1988) dalam buku sugiyono (2013:226) menyatakan bahwa :

observasi adallah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.

<sup>25</sup>Sugiyono (2013:227-228) , menyatakan ada 3 betuk observasi yaitu :

---

<sup>23</sup> nasution (1988),Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 223.

<sup>24</sup> nasution (1988),Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 226.

<sup>25</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 227-228.

1. Observasi partisipatif
2. Observasi terstruktur atau tersamar
3. Observasi tak berstruktur

### 3.5.2 Wawancara mendalam (*indeep interview*)

Teknik wawancara menurut <sup>26</sup>sugiyono (2013:137), menjelaskan pengertian wawancara sebagai berikut :

wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus di teliti , dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondennya sedikit/ kecil.

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara deep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara .

Lincon dan guba dalam <sup>27</sup>sugiyono (2013:235) , mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan di lakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara

---

<sup>26</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 137

<sup>27</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 235

4. Melaksanakan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendamping Desa Pegagan Julu II
- b) Kepala Desa Pegagan Julu II
- c) Tokoh masyarakat
- d) Masyarakat Setempat

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet, dan lain-lain. Dokumen dapat berupa bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, atau dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, biografi, peraturan dan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.

yang merupakan pelengkap data dalam penelitian. Sehingga peneliti perlu mencermati data dokumentasi tersebut. apa yang di katakan <sup>28</sup>sugiyono (2013:240) dalam bukunya :

Tetapi perlu di cermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya. Karna foto di buat untuk kepentingan tertentu, demikian juga autobiografi yang di tulis untuk dirinya sendiri sering subyektif.

Maka dari itu agar hasil Dokumentasi data yang di dapatkan oleh peneliti lebih kredibel / dapat di percaya , tentu peneliti harus lebih hati-hati dalam menetapkan dokumen apa saja yang layak untuk di gunakan dalam lembaran dokumentasi penelitian.

### **3.5.4 Triagulasi**

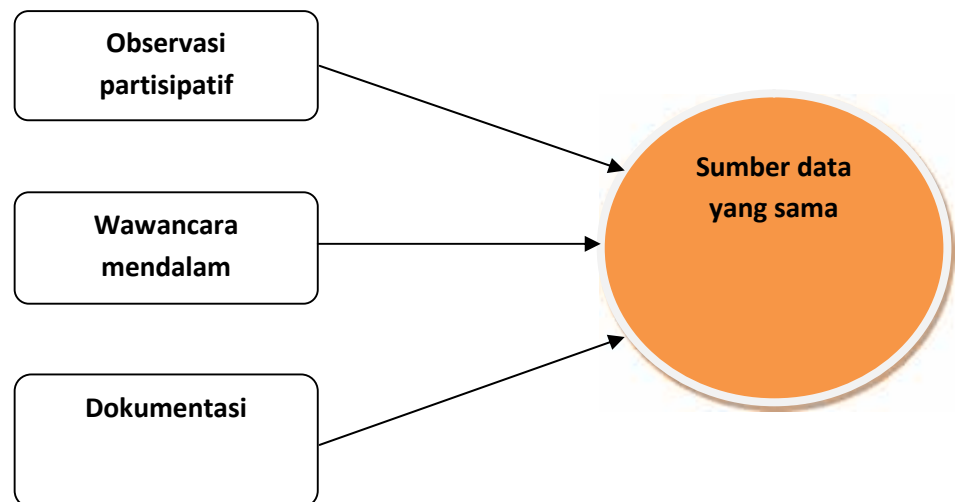
<sup>29</sup>Sugiyono (2013:241) Dalam teknik pengumpulan data, triagulasi dapat di artikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada . triagulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama , peneliti menggunakan observasi, partisipatif, wawancara mendalam (*deep interview*) dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trigulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama. Hal

---

<sup>28</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 240.

<sup>29</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 241

ini dapat di gambarkan menurut <sup>30</sup>sugiyono (2013:242) Teknik trigulasi pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama, terlihat pada gambar berikut :



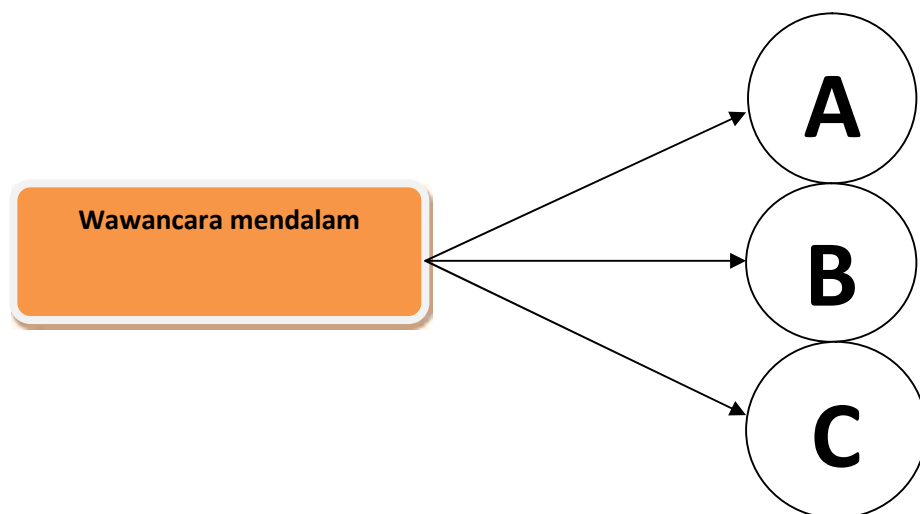
Gambar 3.2 Triagulasi “teknik” pengumpulan data. (bermacam macam cara pada sumber yang sama) <sup>31</sup>Sugiyono (2013:242)

---

<sup>30</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 242.

<sup>31</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 242.





Gambar 3.3 Triagulasi “sumber” pengumpulan data. (satu tehnik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C)  
<sup>32</sup>Sugiyono (2013:242)

### 3.5.5 Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Cara pengumpulan data Dilakukan dengan menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

<sup>33</sup>(Sumadi suryabrata, 1996) dalam buku sugiyono (2013:58-59) di tuliskan :

untuk menguasai teori dan generalisasi-generalisasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus rajin membaca, orang harus membaca dan membaca,

<sup>32</sup> Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 242.

<sup>33</sup> Sumadi suryabrata : 1996, Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 58-59

dan menelaah yang di baca itu setuntas mungkin agar ia dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya , membaca merupakan keterampilan yang harus di kembangkan dan dipupuk.

### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana peran Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Desa pegagan julu II kecamatan sumbul kabupaten dairi . Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.

<sup>34</sup>Miles dan Huberman (1984) dalam buku sugiyono (2013:246) mengemukakan :

bahwa aktivitas dalam analisis data penelitian di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

---

<sup>34</sup> Miles dan Huberman (1984), Sugiono metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 246.

Jika kita lihat secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengelolah data dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *General sense* atas informasi yang di peroleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelolah materi/ informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah di kumpulkan selama proses pengumpulan data mensegmentasi kalimat-kalimat atau (paragraf-paragraf).
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* Orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara

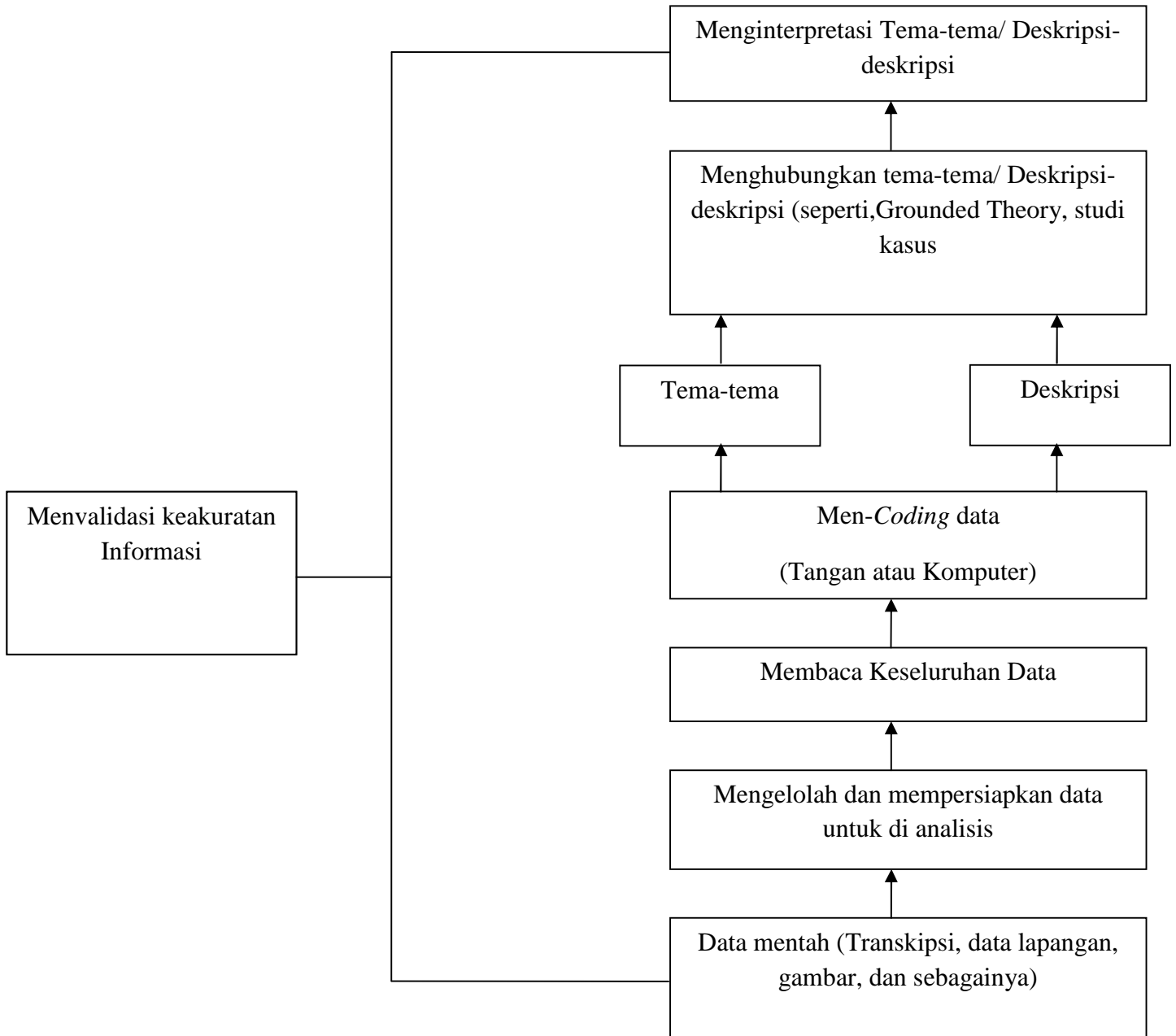
detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam settingan tertentu.

- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan di sajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa saja yang bisa di ambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Edisi Ketiga, Hal 276

**Gambar 3.4**  
**Teknik Analisis Data**



Sumber: Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed*  
Edisi Ketiga Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013.

### 3.7 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti, maka dikemukakan fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses berupa pembangunan pembuatan Pengaspalan jalan , Pembuatan parit semen mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai kepada tahap pengawasan.

2. Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang di maksud adalah pembangunan pengaspalan jalan , pembuatan parit semen yang dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya. Sedangkan infrastruktur non fisik berupa bidang pembinaan kemasyarakatan (kader posyandu), Bidang pemberdayaan masyarakat desa (Pelatihan pembinaan Kader PKK) juga salah satu upaya pemerintah setempat dalam membina kader-kader yang berkompeten di bidangnya . Oleh karena itu, peran serta dari seluruh aparat Pemerintah Desa sangat di butuhkan untuk ikut andil dalam pembangunan desa dan masyarakat desa.

3. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi segala hal yang menjadi tantangan pembangunan, baik berupa faktor penghambat maupun pendukung.

